BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faktanya, masyarakat hukum adat di Indonesia secara sah telah ada sedari lama. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan genetik maupun geografis dan mempunyai warga yang berbeda dari warga masyarakat hukum adat lainnya, serta memiliki sumber penghasilan sendiri. Masyarakat hukum adat juga dapat bertindak selayaknya satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang independent dan mandiri di dalam dan di luar masyarakat hukum adat.¹ Berdasarkan kata lain, masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang menempati sebuah daerah dan memiliki aturan hukum adatnya sendiri yang mengikat masyarakat bagiannya.

Telah ditegaskan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat, yang tertulis sebagaimana: *“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Dalam karya buku berjudul *“Hukum Adat Indonesia”*, Prof. Soerjono Soekanto menuliskan pendapat Hazairin yang mengungkapkan bahwa

¹ Aprilianti. Kasmawati, (2020), *“Buku Ajar Hukum Adat Di Indonesia”*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Lampung, link: <http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>

masyarakat hukum adat terangkum pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan isi:²

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Adat dipandang sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan turun temurun yang terjadi pada sekelompok masyarakat di daerah tertentu, sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan zaman, dan terkadang bertentangan dengan pedoman agama dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi, sebab “adat” merupakan sebuah hukum atau ajaran yang tidak ada sanksi nyata (hukuman) untuk masyarakat, kecuali menyangkut perihal dosa dalam adat yang memiliki kaitan dengan larangan atau hal yang dianggap tabu untuk dilakukan dalam masyarakat di daerah tertentu yang menganut sistem adat tertentu.

Hukum adat yang merupakan sistem hukum tidak hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di NKRI saja, tetapi terdapat juga pada beberapa negara tetangga, seperti India, Tiongkok dan Jepang. Hukum adat Indonesia merupakan hukum murni dari bangsa Indonesia yang asalnya digali dari kaidah aturan tidak tertulis yang lahir, menetap, dan tetap dipegang teguh atas dasar naluri akan peraturan sebuah masyarakat itu sendiri.

Indonesia memiliki berbagai keragaman dari mulai suku bangsa, budaya, ras, agama, serta adat istiadat yang berbeda tetapi tetap satu tujuan. Hal inilah

² Soekanto. Soerjono, (2020), *“Hukum Adat Indonesia”*, cet.16, Depok: Rajawali Pers, ISBN: 978-602-425-536-7, hal. 93

yang menjadi salah satu ciri khas yang membentuk negara Indonesia. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai dinamika kehidupan yang mencakup 3 (tiga) hakikat utama sebuah kehidupan, diantaranya:³

1. Kelahiran.
2. Kehidupan.
3. Kematian.

Muhammad Taufiq Hidayat, Eko Rial Nugroho dalam jurnalnya yang berjudul “*Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi Di Papua Barat (Studi Kasus Pada Kota Sorong Provinsi Papua Barat)*”, menerangkan bahwa Hukum Nasional Tanah berasal dari Hukum Adat setempat, sehingga Hukum di Indonesia menghargai keberadaan hak ulayat. Seperti yang mana telah tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui keberadaan hak ulayat pada sistem hukum pertanahan nasional.

Hak ulayat disebut sebagai hak pemanfaatan paling tinggi didalam masyarakat hukum adat atas sebidang tanah yang adalah kepemilikan anggota sekelompok masyarakat adatnya. Meski begitu, ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria memberi batas terkait keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat.⁴ Batas keberadaan hak ulayat tersebut yakni selama berdasar kenyataannya masih hidup, hal itu sesuai dengan asas nasional serta

³ Tjahjani, Joejoen. (2020). "Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum". Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. hal. 273-278. vo. 8, No. 1. link: <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/113/pdf>

⁴ Subekti, (2003), "Pokok-Pokok Hukum Perdata", cetakan XXXII, Jakarta: Intermasa, hal. 93

keberadaannya tidak diperkenankan menentang peraturan perundang-undangan di atasnya yang memiliki jenjang lebih tinggi.⁵

Selaras berdasar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemanfaatan fungsi atas sumber alam sebagaimana ada di dalam ataupun di luar seperti tanah, air dan sebagainya agar sesuai dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga kewenangan Negara bukanlah kewenangan untuk memiliki, melainkan kewenangan untuk mengatur penggunaan, peruntukkan serta memelihara kekayaan alam yang sebesar-besarnya dan juga memberikan landasan terhadap hubungan yang terjadi antara orang dengan tanah serta alas hak yang diberikan terhadap tanah dan kekayaan alam yang ada didalamnya.

Soerjono Soekanto dalam Buku karyanya dengan judul “*Hukum Adat Indonesia*” mengemukakan terkait tanah memiliki fungsi yang sangat riskan bagi masyarakat hukum adat. Tanah bisa dibidang sebagai tempat bagi masyarakat hukum adat tinggal dan bertahan hidup. Penjelasan itu segaris dengan pandangan Iman Sudayat yang menerangkan sebagai berikut:⁶

*“Sebagai salah satu unsur esensiil pembentuk negara, tanah memegang peran penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, terlebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di negara yang masyarakatnya melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu **conditio sine qua non.**”*

⁵ Fakultas, J., Ratulangi, H. S., David, M. S., Sondakh, J., & Korua, J. M. (2021). *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat 1*, hal. 114

⁶ Soekanto. Soerjono, *Op.Cit*, hal. 173

Masyarakat Hukum Adat memiliki kebebasan untuk menduduki dan memanfaatkan tanah yang tergolong dalam lingkup wilayah masyarakat hukumnya. Tanah yang diusahakan itu bisa dikuasai dengan hak pakai, tetapi ada beberapa masyarakat hukum adat yang menginginkan tanah menjadi hak milik masyarakat hukum adat.⁷

Oleh sebab sangat riskannya peran tanah dalam hidup masyarakat Indonesia, seringkali terjadi sengketa pemanfaatan tanah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang menimbulkan perselisihan antara kelompok masyarakat adat satu dengan kelompok masyarakat adat lain atau bahkan dengan pemerintah. Sengketa tersebut dapat terjadi akibat skala keperluan masyarakat akan tanah yang semakin bertambah, namun ketersediaan tanah di Indonesia yang semakin menipis.

Proyek-proyek pembangunan yang dicanangkan pemerintah semakin banyak dan membutuhkan tanah untuk merealisasikannya, seperti pengalihan tanah hak milik adat menjadi lahan Transmigrasi.⁸ Kegiatan penyediaan tanah untuk kawasan transmigrasi merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program transmigrasi. Pesatnya perkembangan pembangunan diberbagai sektor menyebabkan pemerintah sulit mendapatkan lahan. Ditengah keterbatasan lahan yang ada, persyaratan status tanah lokasi harus *clear and clean* (jelas status hukumnya dan bebas dari konflik pertanahan), serta harus

⁷ Harsono. B, (2013), *"Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya"*, Jilid 1, Djakarta: Universitas Trisakti, hal. 187

⁸ Oktafiani, I., & Yogaswara, H. (2020). *"Transmigration program can be failed, but transmigrant stay life: Portraits of Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua"*. ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia, 5(2), 200–220. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i2.10723>

memperhatikan syarat layak tinggal, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan. Atau biasa disebut dengan syarat 4L.⁹

Agar tidak menimbulkan konflik sengketa nantinya, maka terkait proses musyawarah hingga pemberian ganti rugi perlu diperoleh kepastiannya pada waktu Pemerintah menerima penyerahan sebagian tanah ulayat atas persetujuan masyarakat hukum adat untuk diberikan suatu hak atas tanah kepada pihak yang memerlukan.¹⁰ Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

UUPA yang berlandaskan pada hukum adat ini harus dikembangkan ke dalam peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adat. Dalam proses menjalankan amanat tersebut, seringkali terjadi benturan kepentingan terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah, contohnya di daerah Papua.¹¹

Pada tahun 2015 silam, Yoatili menunjukkan sebuah penelitian, bahwa permasalahan menyangkut tanah adat pada masyarakat hukum adat belum mampu diselesaikan walaupun telah terdapat otonomi khusus bagi Papua dan

⁹ Irianti, O. E., Suradinata, E., Rowa, H., Majaran, K., Salawati, D., & Sorong, K. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*, hal. 611

¹⁰ *Ibid.* hal, 197

¹¹ Vivianti Alfit, S., & Koeswahyono, I. (2022). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Pertuanan Dalam Hal Penyediaan Tanah Untuk Penyelenggaraan Program Transmigrasi*. 6.

PERDASUS No. 23 Tahun 2008. Kepunyaan tanah sekarang ini masih jadi permasalahan krusial yang diakibatkan oleh:¹²

- 1) belum disahkannya keberadaan hak masyarakat hukum adat oleh Pemerintah dalam status kepunyaan tanah adat;
- 2) Pemerintah seringkali merampas paksa tanah milik masyarakat untuk dijadikan sebagai tanah milik negara;
- 3) Batas tanah adat yang belum jelas dapat mengakibatkan terjadinya sengketa tanah adat.

Menurut Grace Angelia Soenartha, dan Amad Sudiro dalam tulisannya yang berjudul “*Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*” menyatakan bahwa, Papua Barat dan Kabupaten yang ada didalamnya mengalami perubahan signifikan beberapa dekade terakhir, yang mencakup perubahan kebijakan pemerintah, konflik sosial, dan pergeseran dinamika masyarakat adat seiring dengan modernisasi.¹³

Hampir di sebagian besar daerah yang masih terdapat masyarakat adat, seringkali terjadi sengketa tanah antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah setempat berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah.¹⁴ Salah

¹² Rahmadi, Arif, (2022), “*Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua*”, Jurnal elektronik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5.(1), Januari 2022, e-ISSN 2622-9714, hal. 9

¹³ Soenartha, G. A., & Sudiro, A. (2023). *Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>, hal. 4278

¹⁴ David, Mikhael Silas. dkk, (2023), “*Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Administratum Vol.XIII/No.1/Nov/2023, hal. 1-2

satunya adalah masalah sengketa atas tanah adat Papua Barat untuk pembuatan kawasan Transmigrasi yang seharusnya memberikan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi.

Pada pemberian kompensasi tanah masyarakat hukum adat yang berkaitan sebelumnya akan didengar opininya dan akan dikasih "*recognitie*" atau kompensasi yang memang merupakan hak dari masyarakat hukum adat selaku pemegang hak ulayat atas tanah adatnya.¹⁵ Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 1 dan 9 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengemukakan bahwa Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu untuk memperoleh kata sepakat mengenai wujud dan jumlah besaran ganti kerugian yang pantas diserahkan untuk masyarakat hukum adat pemegang tanah.

Namun, pada kenyataannya, pemberian ganti rugi atau kompensasi tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut seperti yang terjadi pada tanah adat milik masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas seluas 8.000 Ha yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Sorong yang dialih-fungsikan menjadi lahan Transmigrasi oleh pemerintah kabupaten Sorong tanpa memberikan jumlah ganti rugi atau "*regocnitie*" yang layak kepada masyarakat hukum adat Marga Sawat Semanas.

¹⁵ Harsono. B., (2013), "*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*", Jilid 1, Jakarta: Trisakti University, hal. 195

Pada kasus sengketa tanah adat kepunyaan masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas seluas 8.000 Ha yang dialihkan menjadi lahan Transmigrasi ini telah melalui tiga tahap persidangan, yakni tahap persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sorong tahun 2018, persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2019, dan persidangan tingkat kasasi di Mahkamah Agung tahun 2024.

Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sorong, pengadilan mengakui bahwa tanah adat sengketa seluas 8.000 Ha yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Sorong, Papua Barat merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas, serta diputuskan bahwa masyarakat adat Marga/Keret Sawat Semanas mendapatkan hak nya berupa pemberian kompensasi terhadap tanah adat tersebut sejumlah 20 Milyar Rupiah karena pada saat pengalihan tanah adat tersebut, masyarakat Marga/Keret Sawat Semanas tidak mendapatkan ganti rugi dan tidak pernah menandatangani surat pengalihan hak kepemilikan apapun atas tanah adat yang merupakan hak ulayat Marga/Keret Sawat Semanas.

Namun, pada persidangan tingkat banding (PT. Jayapura) dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung), hak masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas tidak diberikan. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung yang sebagaimana pokoknya menyatakan bahwa karena masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas tidak menyebutkan nama dan status hidup orang tua mereka,

sehingga surat gugatan dinyatakan *obscuur libel*, karena dikhawatirkan bukan keturunan asli atau ahli waris marga sawat semanas.

Oleh karena pertimbangan dan Amar Putusan hakim tingkat kasasi tersebut menolak gugatan penggugat, membuat hak masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi menjadi hilang. Hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yang menerangkan bahwa untuk keperluan umum, hak atas tanah dapat dialihkan dengan memberikan ganti kerugian yang sesuai berlandaskan undang-undang.

Oleh karena timbulnya persengketaan tanah adat yang merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas, dan dipicu oleh Amar Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas tidak berhak mendapatkan hak *recognitie* atau ganti rugi hanya karena tidak menyebutkan nama dan status hidup orang tua mereka, serta menetapkan tanah adat masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas di kabupaten Sorong, Papua Barat tetap menjadi lahan Transmigrasi dan bukan hak ulayat masyarakat hukum adat marga/keret sawat semanas merupakan sebuah permasalahan yang harus diteliti.

Oleh karena pertimbangan dan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas konsep dan dinamika penyelesaian masalah tanah adat masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas dengan Pemerintah kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai acuan dasar hukum, serta sebagai kritik atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024, yang dirangkum dalam penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Marga Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian Normatif Yuridis yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil 2 (dua) poin permasalahan yang dianggap penting untuk dikaji. diantaranya yakni:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Marga Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap ganti rugi atas Tanah Adat Marga Sawat Semanas di Kabupaten Sorong berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan dua tujuan, sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat yang terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Marga/Keret Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Ganti Rugi atas Tanah Adat Marga/Keret Sawat Semanas di Kabupaten Sorong Papua Barat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024

2. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi manfaat dari penelitian ini, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoritik di bidang ilmu Hukum dalam hal sengketa tanah, khususnya tanah adat yang dialihfungsikan oleh Pemerintah.
- 2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat agar memahami tentang pentingnya penerapan ganti rugi kepada masyarakat adat ketika suatu instansi swasta atau pemerintah ingin mengalihfungsikan tanah adat tersebut menjadi sektor bisnis lain.

b. Manfaat Praktis

- 1) **Bagi Masyarakat Hukum Adat**, agar dapat memahami implementasi ganti rugi atau *recognitie* yang harus diberi oleh Pemerintah kepada masyarakat adat pada saat ingin mengadopsi dan mengalihfungsikan tanah yang adalah hak ulayat masyarakat adat.
- 2) **Bagi Pemerintah**, agar dapat menjadi acuan terkait penerapan pemberian ganti rugi kepada masyarakat adat oleh pemerintah pada saat

terjadi alih fungsi tanah adat untuk sektor Transmigrasi saat ini, dan dapat menerapkannya direalita pemerintahan.

- 3) **Bagi Mahasiswa dan Akademisi**, agar dapat menjadi acuan terkait penelitian dan penulisan karya tulis atau makalah selanjutnya yang berkaitan dengan pemerintah dan tanah adat.
- 4) **Bagi Masyarakat Umum**, sebagai referensi bacaan dan penerapan ganti rugi oleh pemerintah untuk masyarakat adat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan pandangan dan pemikiran Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum mungkin diberlakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti diantaranya :¹⁶

- 1) Adanya beberapa aturan yang jelas, tetap dan mudah didapatkan, dipublikasikan, dan diakui karena kuasa negara.
- 2) Instansi pemerintah mencanangkan aturan atau hukum tersebut secara tetap dan juga patuh kepada pemerintah.
- 3) Masyarakat dari segi prinsip mengaplikasikan tindakan mereka dan tunduk kepada beberapa aturan yang ada dan telah dibuat oleh instansi pemerintah tersebut.

¹⁶ Nur, Zulfahmi. (2023). "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)". Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau. vol. 06, no. 2. hal. 256-257

- 4) Pengadilan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki ide menerapkan beberapa aturan tentang hukum tersebut secara tetap pada saat mentuntaskan permasalahan hukum.
- 5) Putusan pengadilan secara nyata dapat dijalankan.

S. Mertokusumo mendefinisikan Kepastian hukum sebagai suatu tanggungan hukum yang wajib dilaksanakan secara tepat. Kepastian hukum mengidamkan langkah pengaturan hukum pada undang-undang yang disusun oleh pihak legislatif, sehingga peraturan tersebut memiliki pandangan yuridis yang dapat menanggung kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai aturan yang wajib dituruti.¹⁷

Berdasarkan penjabaran tentang teori kepastian hukum diatas, dapat dipahami bahwa dalam kasus yang dibuat oleh Penulis ini, kepastian hukum berada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat hukum adat yang disebabkan karena peralihan fungsi tanah adat menjadi lahan Transmigrasi.¹⁸

Agar hak masyarakat adat di kabupaten Sorong terpenuhi dan memiliki kepastian hukum untuk menuntut hak nya kepada pemerintah, maka dibuatlah landasan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan memberi sebuah kepastian hukum kepada masyarakat adat kabupaten Sorong, Papua Barat, khususnya masyarakat Hukum Adat Marga/Keret Sawat Semanas.

¹⁷ *Ibid.* hal. 257

¹⁸ Lihat di Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

b. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan perspektif Hadjon, makna perlindungan hukum ialah sebuah perlindungan yang mencakup segala hal, seperti harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang merupakan subjek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.¹⁹

Hadjon mengelompokkan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Preventif, yakni masyarakat dipercayakan untuk memberikan pendapat sebelum keputusan pemerintah berbentuk definitif untuk mencegah terjadinya masalah.
- 2) Perlindungan Represif, berfungsi untuk mentuntaskan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu tanggungan negara yang diberikan kepada para pihak untuk dapat menjalankan keperluan hukum yang dipunyainya berdasar kemampuan sebagai subjek hukum.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto dalam karya tulisnya, mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai perlindungan yang diberikan untuk subyek hukum dalam bentuk seperangkat aparat hukum. Selain peran aparat hukum, terdapat setidaknya lima faktor dan penyebab yang mempengaruhi proses pelaksanaan penegakkan hukum serta perlindungannya, diantara penyebab tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>

²⁰ *Ibid.*

- 1) Faktor positif hukum, yaitu asas tertulis yang berlaku publik dan disusun oleh pihak legislatif.
- 2) Faktor aparat hukum, yaitu pihak-pihak yang berperan pada penegakan hukum, apakah secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Faktor fasilitas penegakan hukum, yakni keterampilan sumber daya manusia atau peralatan yang memadai.
- 4) Faktor subjek hukum (masyarakat), yaitu wilayah tempat hukum berlaku dan ditaati. Pemahaman masyarakat akan hukum yang diterapkan dipercaya sebagai salah satu penyebab keadaan yang damai.
- 5) Faktor budaya, merupakan hasil sebuah karya, sebuah cipta dan sebuah rasa yang didasari pada kekuatan jiwa manusia dalam lingkup sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum Fitzgerald adalah *“untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan tersebut”*. Dari gagasan ini, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia untuk bertindak atas kepentingannya sendiri.

Berdasarkan perincian mengenai teori Perlindungan Hukum diatas, maka dapat dilihat dan dipahami bersama bahwa undang-undang telah melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah milik mereka yang sudah ada sejak turun temurun. Peraturan Hukum yang menjelaskan dan menata mengenai hak masyarakat adat atas tanah adat nya adalah Undang-Undang

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 yang menerangkan bahwa Lahan Adat yang terlantar dalam pengaturannya tetap menjadi hak pengelolaan masyarakat hukum adat. Dengan adanya UUPA dan PP Nomor 20 Tahun 2021 tersebut, telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang masih memiliki tanah adat di wilayahnya.

c. Teori Keadilan

Berdasarkan pandangan Plato, Keadilan merupakan bentuk kemerdekaan dan partisipasi masyarakat atau negara dalam merumuskan gagasan mengenai hal baik untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.²¹ Bagi Plato, Keadilan dan hukum adalah kaitan rohani publik dari sebuah masyarakat dalam merumuskan dan menjaga kesatuannya.

Pandangan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul “*Nichomachean Ethics*”, Buku V menerangkan bahwa keadilan merupakan kelayakan tindakan manusia (*fairness in human*). Teori keadilan menurut Aristoteles berdasar pada persamaan (*aquality*).²²

Aristoteles memisahkan keadilan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Keadilan yang bersifat Distributif, adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yang berfokus pada pembagian kekayaan dan harta benda lain kepada masyarakat.

²¹ Hukum online. Link: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>

²² Kaelan. (2022). “*Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*”. Yogyakarta: Paradigma Pustaka bekerjasama dengan Badan Pengkajian MPR RI. hal.278

- 2) Keadilan Korektif, berarti memperbaiki atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada orang yang dirugikan atau memberikan ganjaran yang pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan.

Berdasarkan pendapat seorang filsuf bernama Augustinus, Keadilan merupakan asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian, sedangkan perdamaian merupakan sebuah ikatan yang diinginkan semua orang dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Teori keadilan menurut aliran liberalisme dapat diartikan sebagai suatu ketertiban rasional (*rational order*) yang didalamnya terdapat hukum alamiah yang ditaati dan sifat dasar manusia yang diwujudkan. Hubungan antara keadilan dengan kebebasan bukan hanya sebagai sarana, melainkan sebagai ketertiban dari kebebasan itu sendiri atau menjadi sebuah realisasi dari kebebasan tersebut.

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantifnya. Dia mengelompokkan prinsip keadilan menjadi dua bagian, yakni:

- 1) Prinsip kebebasan setara, yang berarti bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kebebasan dasar yang sistemnya serupa dengan kebebasan bagi semua (*liberty for all*).
- 2) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi, yang berarti bahwa ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk memberi provit terbesar kepada mereka yang kurang beruntung.

²³ *Ibid. hal. 282-284*

Berdasar perincian terkait teori Keadilan diatas, dapat disimak bersama keterkaitan antara teori keadilan dengan kasus yang diteliti oleh penulis ini terletak pada hak yang diterima oleh masyarakat hukum adat berupa jumlah uang ganti rugi yang diberikan pemerintah pada saat pengalihan tanah adat menjadi lahan Transmigrasi. Besaran ganti rugi yang diperoleh masyarakat adat harus selaras dengan aturan perundang-undangan yang ada, atau selaras dengan kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat adat setempat.

Dalam kasus ini, penulis menggaris bawahi terkait keadilan yang seharusnya didapat oleh masyarakat adat Marga/Keret Sawat Semanas yang berada di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Papua Barat terkait tanah adat mereka yang dialihfungsikan oleh pemerintah menjadi lahan Transmigrasi.

2. Kerangka Konseptual

a. Hukum Adat

Prof. Budi Harsono mengutip pendapat Kusumadi Pudjosoarjo yang menyebutkan bahwa “hukum adat merupakan keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.” Prof. Budi Harsono juga mengutip pengertian Hukum Adat pada pertemuan hukum adat dan pembangunan hukum nasional, organisasi pembinaan hukum nasional departemen kehakiman, Yogyakarta pada tahun 1975 yang menerangkan: “hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, yang merupakan

hukum tidak tertulis, dan mengandung unsur nasional dengan keseimbangan yang diliputi unsur keagamaan.”²⁴

Herlindah dalam materinya yang berjudul *Pengertian Dasar dan Guna Mempelajari Hukum Adat* berlandaskan pada pandangan Terhaar Bzn yang menyatakan: "Hukum adat merupakan seluruh peraturan yang berubah dalam keputusan kepala adat dan berlaku secara spontan dalam kehidupan masyarakat."²⁵

Pengertian Hukum Adat juga dikemukakan oleh Prof. Soepomo pada karya tulisnya yang berjudul "Hukum Adat Dikemudian Hari", menerangkan bahwa "*Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup sebagai praktik hukum di badan-badan negara dan hidup sebagai peraturan karena kebiasaan yang dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.*"²⁶

b. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok warga yang hidup bersama pada jangka waktu lama, sehingga mewujudkan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah adat istiadat atau kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut.

Mengutip pendapat Hazairin, dalam bukunya dengan tema *Hukum Adat Indonesia*, Soerjono Soekanto menerangkan bahwa:

²⁴ Harsono. B., (2013), "*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*", Jilid 1, Jakarta: Trisakti University, hal. 178

²⁵ Herlindah. (2013). "*Pengertian Dasar dan Guna Mempelajari Hukum Adat*". Materi Perkuliahan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. hal. 19-21

²⁶ Soepomo. (1951). *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*. Jakarta: Kebangsaan Pustaka Rajat. hal. 31-33

“Masyarakat Hukum Adat di Jawa, Sumatera Selatan, Minangkabau, Tapanuli, dan Sulawesi Selatan merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki kelengkapan untuk mampu berdiri sendiri, yaitu dengan memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan tempat tinggal berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.”²⁷

Mengutip gagasan Soepomo tahun 1977 dalam bukunya yang kemudian diterangkan kembali oleh Soekanto dalam karyanya yang bertema *“Hukum Adat Indonesia”* menerangkan bahwa “masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat karena dua faktor, yaitu berdasarkan faktor pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasarkan faktor kesamaan lingkungan daerah tempat tinggalnya (territorial).”²⁸

c. Masyarakat Hukum Adat Marga Sawat Semanas

Masyarakat Marga/Keret Sawat Semanas merupakan salah satu marga dari komunitas suku Moi dan berasal dari sub Sub Suku Moi Sigin dan merupakan salah satu dari kurang lebih 10 (sepuluh) masyarakat hukum adat marga/keret sub Suku Moi Sigin yang menempati dan memanfaatkan tanah adat di Kelurahan Moi Sigin dan Katinim, kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

²⁷ Soekanto. Soerjono, (2020), *“Hukum Adat Indonesia”*, cet.16, Depok: Rajawali Pers, ISBN: 978-602-425-536-7, hal. 93

²⁸ *Ibid.* hal. 94

Masyarakat Adat Marga/Keret Sawat Semanas memiliki mata pencaharian berupa menjadi petani sagu dan petani sawit di tanah adatnya untuk kemudian digunakan sebagai bahan makanan dan sisanya akan dijual. Selain menjadi petani sagu dan sawit, masyarakat marga/keret sawat semanas juga membudidayakan tanaman, seperti pisang, singkong, talas, dan sebagainya.²⁹

Masyarakat Adat Marga/Keret Sawat Semanas telah menempati tanah adat di Kelurahan Moi Sigin dan Katinim, Katoptop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat sejak tahun 1956. Semenjak terjadinya masa Transmigrasi Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1980, terjadi pemindahan besar-besaran masyarakat adat yang tinggal di kelurahan Moi Sigin yang merupakan lokasi pemukiman di pulau ke daratan Sorong.

d. Tanah Adat

Tanah Adat merupakan sebuah lahan pertanahan yang berada di suatu daerah tertentu dan dimiliki serta dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat di daerah tersebut. Tanah Adat telah deprakarsai pada Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan selama pada kenyataannya masih ada.

Berdasar pada PERMEN Agraria/ATR BPN Nomor 5 Tahun 1999, sebuah Tanah Adat merupakan tanah dengan hak milik ulayat

²⁹ Artikel Badan Registrasi Wilayah Adat Papua, link: <https://brwa.or.id/wa/view/UDRDakU3NG5xVDQ> diakses pada 07 November 2024

berdasarkan hukum adat tertentu. Tanah adat adalah sebuah bentuk kepemilikan masyarakat hukum adat yang telah diprakarsai dari mulai zaman dahulu kala.

Simon Abidi Kari dalam Disertasinya yang berjudul “*Membayangkan Adat: Suatu Kajian tentang Tanah Adat, Sengketa dan Penyelesaiannya di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*”, menerangkan bahwa menurut peraturan hukum adat, kepemilikan dan penguasaan atas tanah adat telah ditentukan kepemilikannya berdasarkan tanda yang dibuat oleh masyarakat adat setempat, seperti batu yang menonjol, tikar, pohon, sungai, dan sebagainya. Menurut masyarakat adat Papua, kepemilikan dan penguasaan tanah adat di Papua tidak dilakukan oleh negara, melainkan dilakukan oleh masyarakat adat bersama pimpinannya (kepala keret/suku).³⁰

e. **Ganti Rugi Atas Penggunaan Tanah Adat**

Ganti rugi tanah adat merupakan sebuah kompensasi yang diberikan oleh suatu instansi kepada masyarakat adat selaku pemilik tanah adat tersebut atas beralihnya hak tanah adat. Ganti rugi tanah adat dapat diserahkan bisa dalam wujud uang, penggantian tanah, tempat tinggal kembali, saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak ketika proses permusyawaratan adat.³¹

³⁰ Abdi, S., & Frank, K. (2009). *Membayangkan adat*. hal. 81

³¹ Lihat di Pasal 36 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012

Gayatri Andi Wulandari mengutip penjelasan Maria Sumardjono terkait ganti rugi dalam thesis Universitas Airlangga yang menyebutkan bahwa, "ganti rugi merupakan suatu upaya sebagai perwujudan rasa hormat terhadap hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum sehingga dapat disebut adil, ketika hal tersebut tidak membuat seorang menjadi lebih miskin atau lebih kaya dari keadaan sebelumnya".³²

f. Sengketa

Hartana dan Marta dalam jurnalnya yang berjudul Persengketaan-Persengketaan Tanah di Indonesia, mengutip pengertian sengketa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor 3 Tahun 2011 menjelaskan bahwa "Sengketa pertanahan merupakan sengketa dengan tanah sebagai objek sengketanya yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan masyarakat sosial dan tidak ada pengaruh politik".³³

Layyin Mahfiana dalam jurnalnya yang berjudul "*Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo*" mengutip pendapat Gunawan Wiradi dalam bukunya yang berjudul *Reforma Agraria: Perjalanan Yang belum Berakhir*, mengungkapkan bahwa: "*sengketa tanah merupakan sebuah interaksi antara dua orang atau*

³² Hajati, Sri, Gayatri A.W, (2015). TESIS. *Pemberian Ganti Rugi Tanah Bekas Milik Adat Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Timur Di Kabupaten Lumajang* . Surabaya: Fakultas Hukum Unair. hal.7

³³ Hartana, Marta Cristina. (2019). "Persengketaan-Persengketaan Tanah di Indonesia". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha. hal. 27

lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek tanah dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah".³⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis untuk menulis skripsi ini yaitu dengan memakai jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan bahan hukum berupa studi pustaka. Dalam perspektif penulisan ini, sistem normatif dimaksudkan mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan adat, stigma, dan doktrin yang berlaku.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Soekanto Soerjono dalam tulisannya berpendapat bahwa terdapat lima lingkup ringkas penelitian hukum, diantaranya yakni penelitian tentang asas hukum, tata urutan hukum, skala kesesuaian hukum, asal muasal hukum, serta perbandingan hukum.³⁶

Selain itu, Peter M. Marzuki berpendapat bahwa tema pendekatan penelitian pada penelitian hukum mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan permasalahan (*case approach*), pendekatan dari segi sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*).

³⁴ Mahfiana, Layyin. (2013). "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo". *Jurnal STAIN Ponorogo. Kodifikasi*, Vo. 7 No. 1. hal. 49

³⁵ Fajar, Mukti & Yulianto A. (2010). "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34

³⁶ Muhaimin. (2020). "Metode Penelitian Hukum". Buku Elektronik: Mataram University. ISBN: 978-623-7608-48-6. hal. 47

Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam meneliti proses penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan ketentuan UUPA.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder, yang berasal dari penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini. Bahan Hukum yang digunakan peneliti ada 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai acuan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Primer yang digunakan untuk penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jo UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- 6) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Papua

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Buku Hukum Adat Indonesia
- 2) Buku penjabaran tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- 3) Buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 2142 K/Pdt/2024
- 4) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Adat pada Putusan Nomor 2142 K/Pdt/2024

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, kamus hukum, artikel hukum, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yakni Studi Kepustakaan dengan menggunakan buku hukum

pertanahan dan hukum adat, jurnal terkait tanah adat, skripsi, thesis, disertai, kamus hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis yaitu analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum berkaitan dengan Ganti Rugi (*recognitie*) atau kompensasi yang harus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Masyarakat Hukum Adat Marga/Keret Sawat Smenas pada saat mengalih-fungsikan tanah adat yang merupakan hak ulayat menjadi berbagai sektor pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang dan proses penyelesaian sengketa tanah adat di Sorong terkait pembuatan lahan Transmigrasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta mempersingkat pembahasan, maka penelitian ini secara sistematis disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang, Rumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini, juga terdapat tujuan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang digunakan sebagai tujuan penelitian ini, terdapat pula metodologi penelitian yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap

penulisan ini, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH ADAT**
MARGA SAWAT SEMANAS DI SORONG, PAPUA
BARAT

Dalam bab berisi tentang Tinjauan Umum dari hukum adat, masyarakat hukum adat, masyarakat adat marga/keret sawat semanas, tanah adat, sengketa, dan ganti rugi yang diambil dari pendapat ahli, traktat, maupun dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

BAB III **FAKTA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**
NOMOR 2142 K/Pdt/2024

Dalam bab ini berisi tentang Fakta-fakta hukum yang menjadikan sebuah Obyek Penelitian dapat dituliskan oleh peneliti sebagai penunjang dalam penulisan isi yang lebih rinci terkait dengan fakta yuridis di lapangan terhadap sengketa tanah adat masyarakat Marga/Keret Sawat Semanas di Sorong, Papua Barat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024.

BAB IV **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA**
TANAH ADAT MARGA SAWAT SEMANAS
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG,

PAPUA BARAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024)

Dalam bab ini berisi hasil dari penelitian kualitatif dan pengkajian pustaka mengenai Proses penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi dalam masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas di Kabupaten Sorong Papua Barat, serta Pengkajian Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Ganti Rugi atau kompensasi atas Tanah Adat Kabupaten Sorong, Papua Barat berdasarkan Putusan Nomor 2142 K/Pdt/2024.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini berisi Penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Serta Saran merupakan rekomendasi peneliti kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tanah Adat. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penelitian ini.